

**STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH DALAM MENINGKATKAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SHALATUL JUMMAVAHMIZA

NIM. 210802045

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

TAHUN 2025 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Shalatul Jummavahmiza
NIM : 210802045
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sawang 1, 20 September 2002
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Yang Menyatakan,



SHALATUL JUMMAVAHMIZA

NIM. 210802045

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
ACEH DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI PROVINSI ACEH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SHALATUL JUMMAVAHMIZA

NIM. 210802045

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP.,M.AP.
NIP. 197911172023212012

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

“STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PROVINSI ACEH”

SHALATUL JUMMAVAHMIZA

NIM. 210802045

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 April 2025
18 Syawal 1446 H

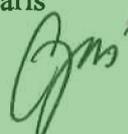
Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

Penguji I

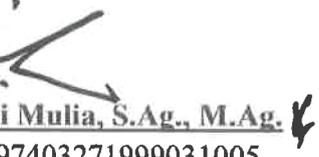
Penguji II


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kebutuhan akan regulasi perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh sangat dibutuhkan saat ini, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh melakukan langkah awal Strategi dalam meningkatkan Perlindungan data pribadi melalui tiga indikator yaitu Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi untuk penyusunan Regulasi setingkat Peraturan Gubernur (PERGUB), dalam hal Pengamanan Informasi banyak ditemukan tantangan dan Hambatan baik itu internal dan eksternal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh meliputi penganggaran dana sebesar 16 juta rupiah untuk penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi, melakukan literasi keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan keamanan informasi di pemerintahan kabupaten dan sektor swasta, dan mengevaluasi menggunakan dokumen kerangka acuan kerja (KAK). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh dinas telah dilaksanakan sesuai indikator meskipun terdapat tantangan dan hambatan internal dan eksternal yang muncul.

Kata Kunci: *Strategi, Perlindungan data pribadi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi dengan judul ***“Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Dalam Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi di Provinsi Aceh”*** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda Nurmiana, S. Pd., dan Ayah Zainuddin, S. Pd., yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, dan mendidik, serta mendoakan peneliti sampai saat ini. Semoga ketulusan keduanya mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku dosen pembimbing I tugas akhir.
7. Cut Zamharira, S.I.P., M.AP. selaku dosen pembimbing II tugas akhir.
8. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, atas doa, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Terima kasih kepada semua teman-teman Ilmu Administrasi negara yang telah mensupport kepada penulis.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya baik materil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Penulis,



SHALATUL JUMMAVAHMIZA

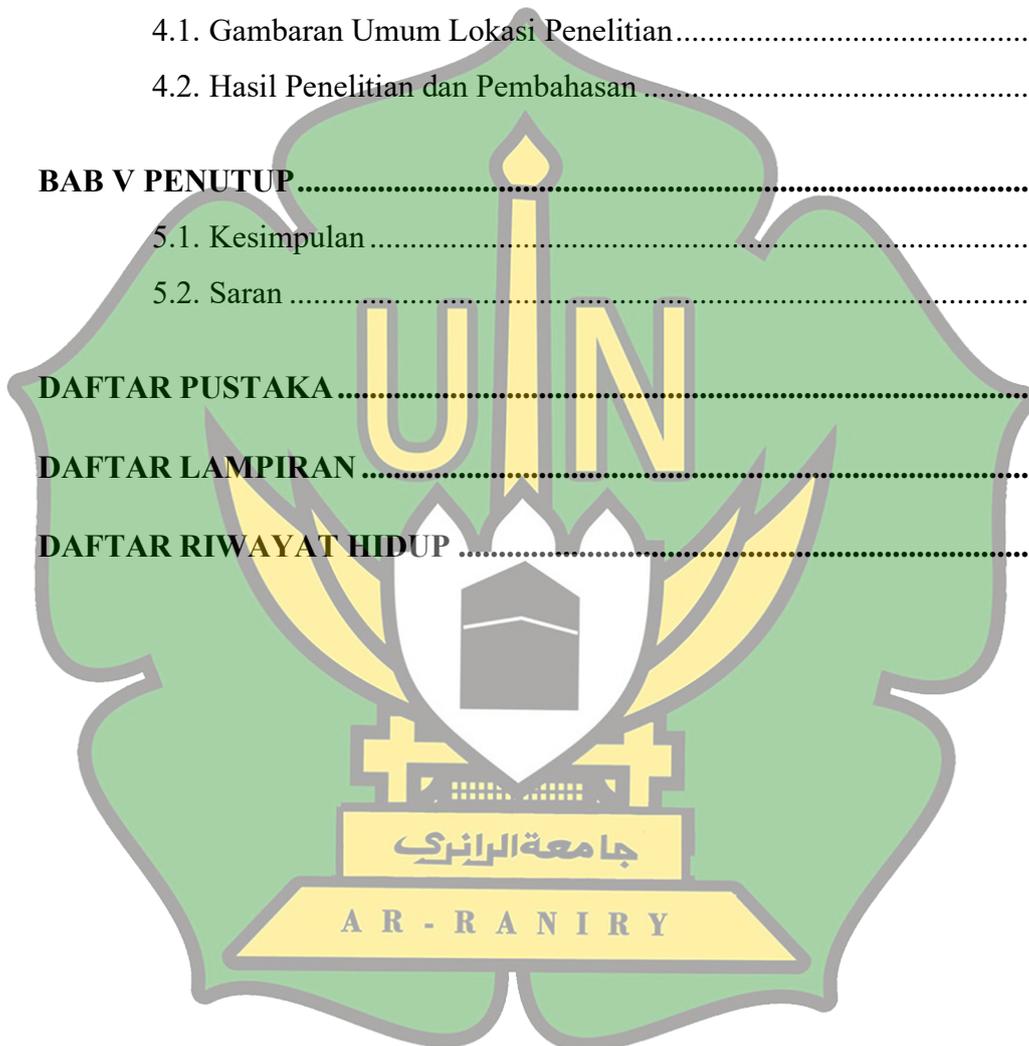
NIM. 210802045



DAFTAR ISI

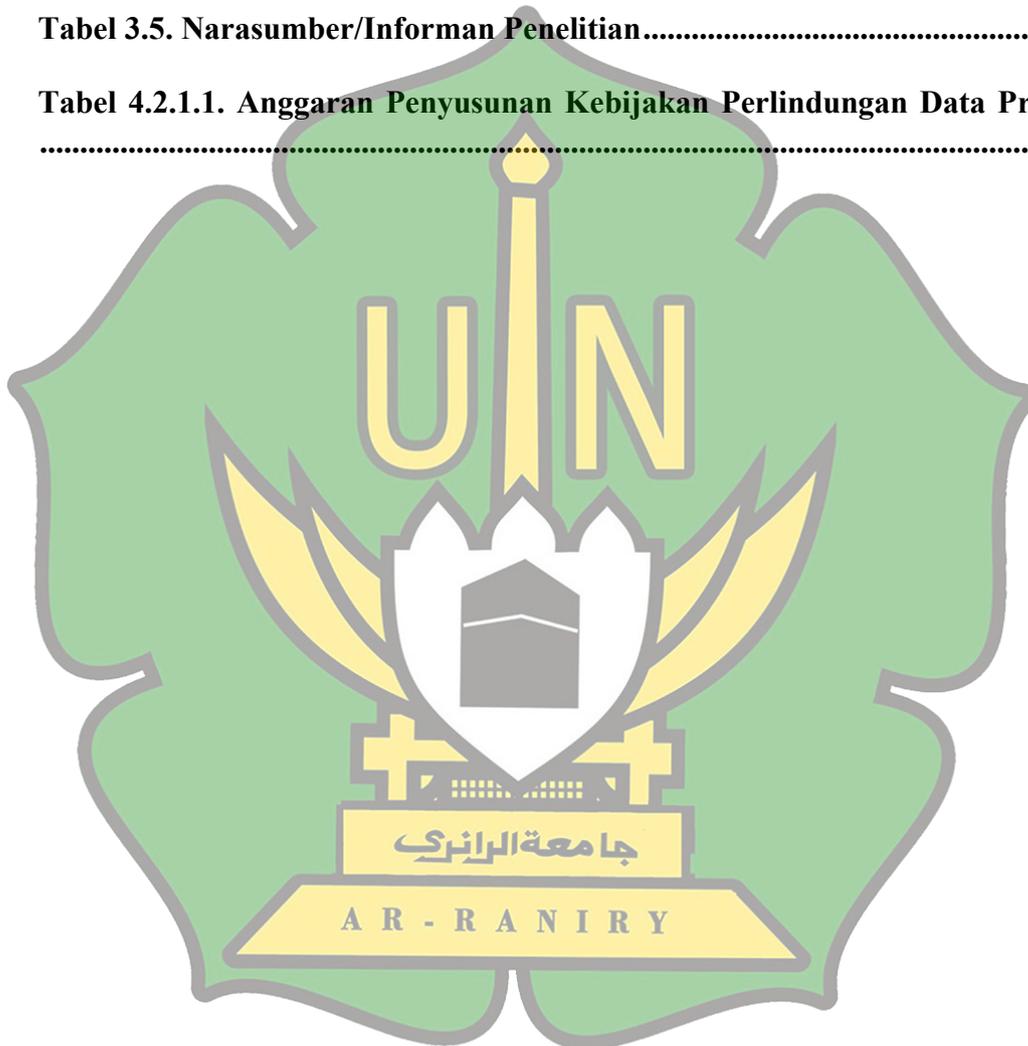
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori Strategi.....	12
2.3. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	14
2.3. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1. Pendekatan Penelitian.....	18
3.2. Fokus Penelitian.....	18
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	21
3.5. Informan Penelitian.....	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22

3.7. Teknik Analisis Data	24
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92



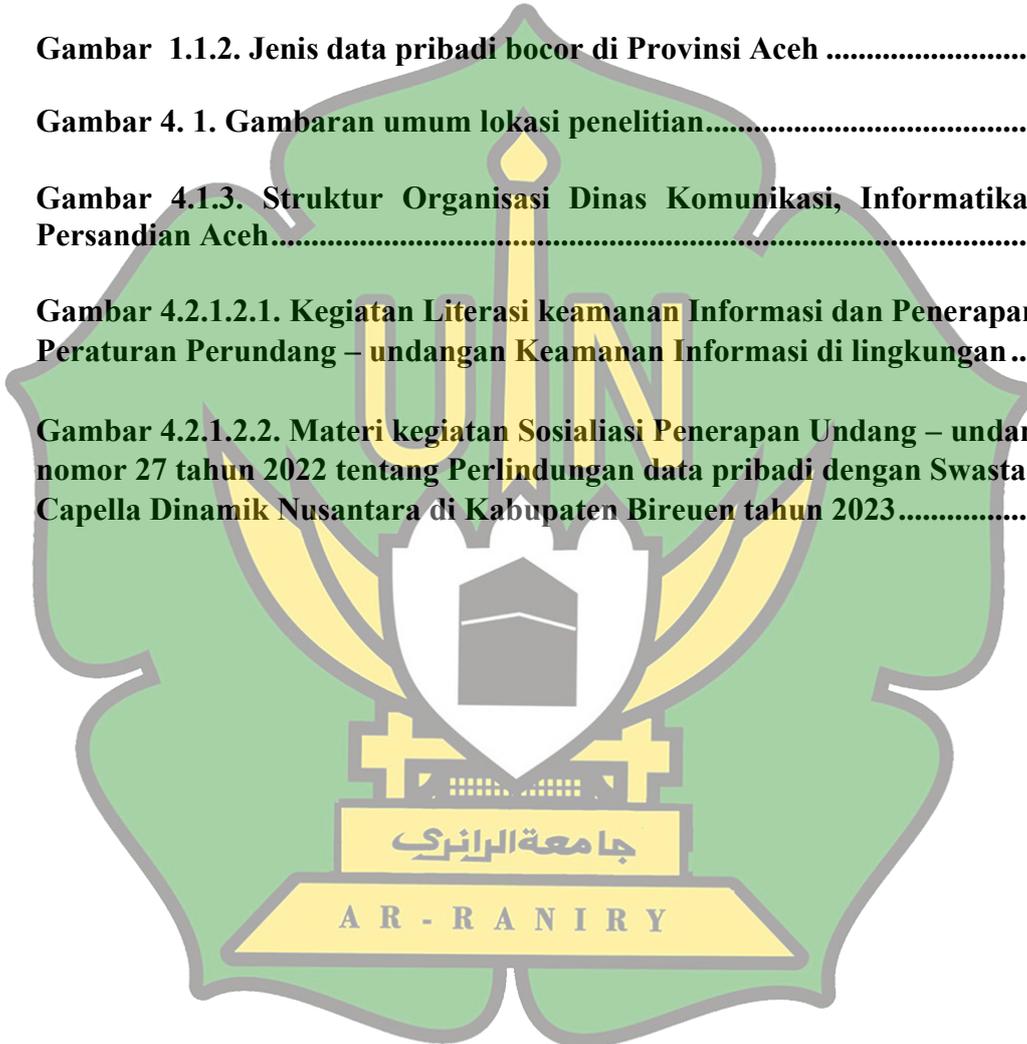
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>Literatur Review</i>	8
Tabel 3.2. Tabel Fokus Penelitian.....	20
Tabel 3.5. Narasumber/Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.2.1.1. Anggaran Penyusunan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi	33



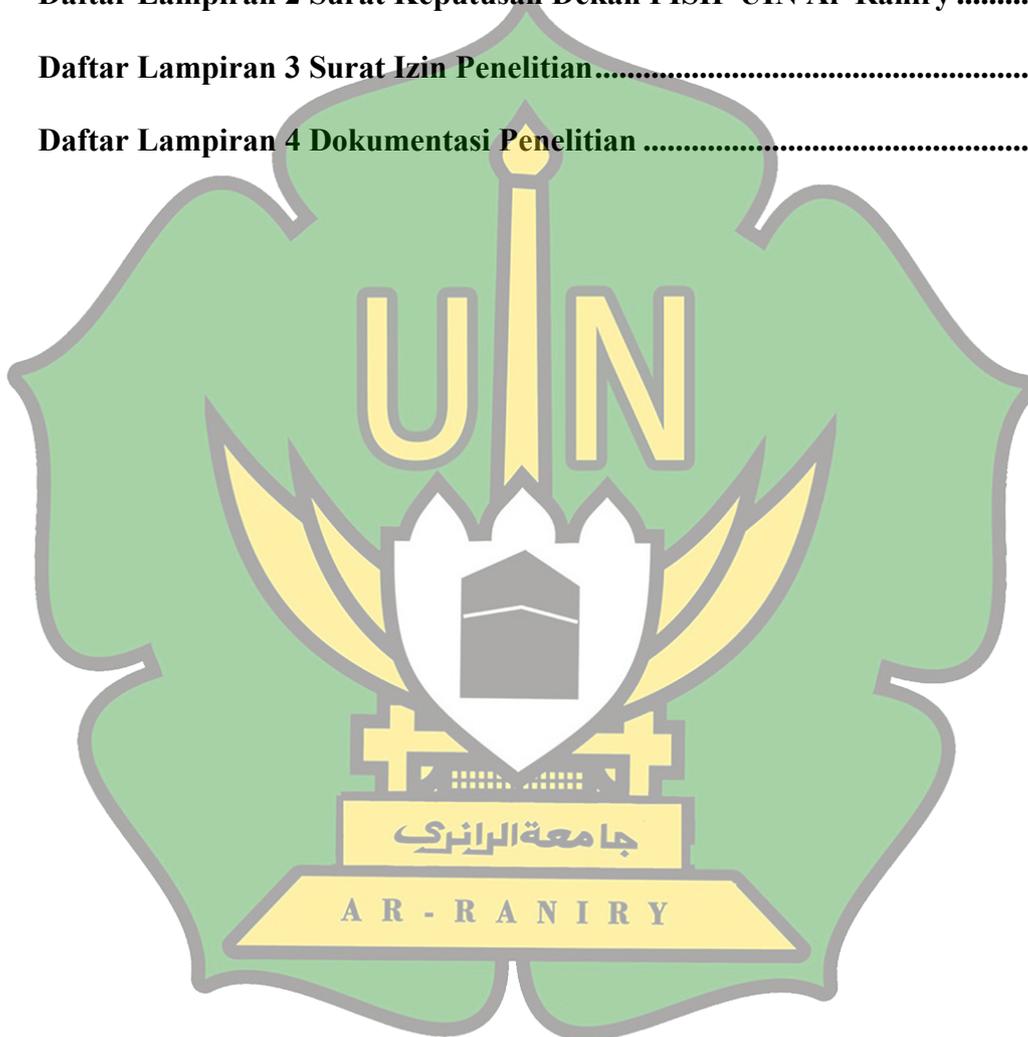
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Jumlah Kebocoran data pribadi di Provinsi Aceh antara tahun 2023-2024	3
Gambar 1.1.2. Jenis data pribadi bocor di Provinsi Aceh	3
Gambar 4. 1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	28
Gambar 4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.....	31
Gambar 4.2.1.2.1. Kegiatan Literasi keamanan Informasi dan Penerapan Peraturan Perundang – undangan Keamanan Informasi di lingkungan	38
Gambar 4.2.1.2.2. Materi kegiatan Sosialisasi Penerapan Undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dengan Swasta PT. Capella Dinamik Nusantara di Kabupaten Bireuen tahun 2023.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	86
Daftar Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	88
Daftar Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	89
Daftar Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh merupakan hal dibutuhkan untuk saat ini. Faktor kebocoran data pribadi menurut kajian literatur T. Rahmat Kautsar tahun 2022, menyatakan tiga penyebab diantaranya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber daya manusia (SDM), dan Teknologi.¹

Berdasarkan analisis peneliti, kebocoran data pribadi dalam dipengaruhi oleh faktor internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi, serta faktor eksternal seperti lemahnya regulasi dan ancaman siber. Peneliti menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan membangun kolaborasi multipihak. Melalui pendekatan *Good Governance* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, bahwa risiko kebocoran data dapat diminimalisir, sehingga tercipta tata kelola keamanan data yang efektif dan berkelanjutan.²

Lahirnya urgensi perlindungan data pribadi, berawal dari pengakuan hak pribadi sebagai hak asasi manusia yang tertuang dengan tegas dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

¹ T. Rahmat Kautsar, “Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi” (UIN Ar-Raniry, 2022).

² *Ibid*

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.³

Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Aceh khususnya pada Bidang Persandian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dalam rangka menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang menjadi urusan pembangunan di segala sektor. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, tujuan dan sasaran yang terkait diantaranya adalah urusan pemerintahan/prioritas dalam hal Keamanan Siber Pemerintah Aceh.⁴

Peneliti menemukan data pribadi bocor di Provinsi Aceh selama tahun 2023 – 2024 sebanyak 1009 data pribadi bocor.⁵ Adapun jenis data pribadi yang mengalami kebocoran sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) tergolong sebagai data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bocor tersebut meliputi nama lengkap, alamat email, kata sandi (*password*), nama ibu kandung dan nomor induk keluarga (NIK).⁶ Berikut Paparan jumlah kebocoran data pribadi di Provinsi Aceh dan Jenis-jenis data pribadi yang rentan terjadi kebocoran:

³ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia,” *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (2022): 13–17.

⁴ “RENSTRA 2023 - 2026 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH,” n.d.

⁵ Sumber: Hasil wawancara pertama dengan kepala bidang Persandian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh hari Jum’at tanggal 24 Januari 2025 jam 10.00 WIB

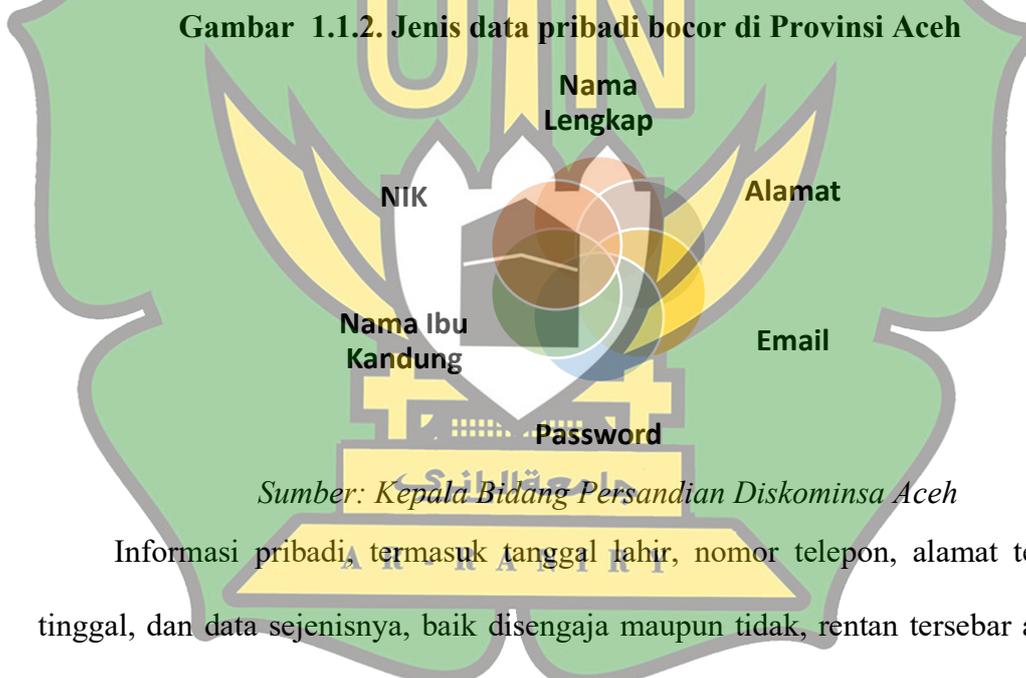
⁶ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, n.d.

Gambar 1.1.1. Jumlah Kebocoran data pribadi di Provinsi Aceh antara tahun 2023-2024



Sumber: Kepala Bidang Persandian Diskominsa Aceh

Gambar 1.1.2. Jenis data pribadi bocor di Provinsi Aceh



Sumber: Kepala Bidang Persandian Diskominsa Aceh

Informasi pribadi, termasuk tanggal lahir, nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan data sejenisnya, baik disengaja maupun tidak, rentan tersebar akibat karakteristik internet yang bersifat terbuka dan tidak terbatas. Kondisi ini memungkinkan data tersebut berpindah dengan cepat dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa adanya mekanisme pengendalian yang memadai, sehingga menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan individu.⁷ Berdasarkan hasil wawancara

⁷ Muhamad Hasan Rumulus and Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.

langsung dengan pejabat bidang Persandian, diketahui bahwa data pribadi tersebut ditemukan telah diperjualbelikan di *dark web* untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Data tersebut berasal dari laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang seharusnya bersifat terbatas dan rahasia.⁸

Permasalahan yang muncul saat ini adalah Provinsi Aceh belum memiliki kebijakan (Peraturan Gubernur) yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Berdasarkan hasil *interview* peneliti dengan kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh (Diskominsa Aceh), diketahui bahwa Qanun terkait Perlindungan Data Pribadi masih berada dalam tahap perencanaan.⁹

Untuk penyusunan kebijakan setingkat Peraturan Gubernur, langkah awal dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh melakukan Strategi mulai dari Perumusan Strategi berupa Penganggaran dana sebesar Rp. 16.000.000 untuk keperluan belanja jasa tenaga ahli untuk penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi, Implementasi Strategi Dinas melakukan kegiatan Literasi Keamanan Informasi dan Peraturan Perundang-undangan Keamanan Informasi yang dilakukan di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Sektor Swasta, dan Evaluasi Strategi mengacu pada Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hasil dari strategi dinas nantinya akan dijadikan sebagai peraturan gubernur dan lahirnya Petunjuk teknis dalam hal Perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh.

⁸ Hasil wawancara dengan kepala Bidang Persandian, Bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tanggal 24 Januari 2025

⁹ Olahan Peneliti

Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak terlepas dari tantangan dan Hambatan Internal dan Eksternal dalam Pengamanan Informasi di provinsi Aceh diantara tantangan dan Hambatan internal yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran yang terbatas, dan Koordinasi internal yang kurang optimal. Sedangkan tantangan dan Hambatan Eksternal yaitu Perkembangan teknologi yang cepat, rendahnya kesadaran masyarakat, regulasi yang belum komprehensif, ancaman dari aktor jahat, dan Infastruktur yang belum merata.¹⁰

Urgensitas akan kebijakan perlindungan data pribadi saat ini nyatanya tidak berbanding lurus dengan pemahaman publik akan pentingnya data tersebut untuk dilindungi.¹¹ Tata kelola pemerintah menuju era digital membuka peluang besar untuk munculnya berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam mengembangkan informasi, baik dilingkungan internal pemerintah maupun dalam hal keamanan informasi publik. Maraknya kasus kebocoran data melalui kejahatan siber yang dialami masyarakat sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran penggunaan akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.¹²

Berdasarkan pada Fenomena dan bukti empiris yang dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji **“Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan**

¹⁰ Hasil Interview dengan Kepala Bidang Persandian

¹¹ Blandina Lintang Setianti Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Buku PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA (Usulan Perlebagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, 2016, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

¹² Bardatul Gaffur, “Evaluasi Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Keamanan Informasi Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *PhD Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2022, 1–23.

Persandian Aceh dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Ditemukan data pribadi bocor di Provinsi Aceh berjumlah 1009 antara tahun 2023 – 2024 yang bersifat umum menurut Undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi (PDP) dan belum memiliki kebijakan Regulasi khusus setingkat Peraturan Gubernur (PERGUB) perlindungan data pribadi di Provinsi Aceh. Dalam hal ini juga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdapat tantangan dan Hambatan internal dan eksternal dalam pengamanan Informasi di Provinsi Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi di Provinsi Aceh?
- 1.3.2. Apa Tantangan dan Hambatan Internal dan Eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam Pengamanan Informasi di Provinsi Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk Menganalisis Tata Kelola Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi di Provinsi Aceh.

1.4.2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Internal dan Eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam Pengamanan Informasi.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Semoga hasil penelitian ini memperdalam kajian tentang Ilmu Administrasi Negara terkhususnya dalam bidang Studi Manajemen Publik Pemerintah.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara Akademis Penulis berharap bahwa temuan penelitian akan menjadi panduan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan ilmu administrasi publik.

